

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pengungkapan lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan, telah ditegaskan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 pasal 66 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa laporan tahunan yang dibuat oleh perusahaan sekurang-kurangnya memuat laporan pelaksanaan sosial dan tanggung jawab lingkungan (Nofianti, Uzliawati, dan Sarka (2015)). Sejak berkembang isu tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan keberlanjutan menjadi fokus utama perannya terhadap lingkungan hidup. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan cenderung melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan karena adanya profitabilitas. Sebagai indikator kinerja yang harus diungkapkan (Safitri dan Saifudin (2019)). *Environmental disclosure* dapat mencerminkan seberapa serius suatu perusahaan mengambil sikap terhadap lingkungan, namun di Indonesia tidak banyak perusahaan yang melakukan pengungkapan jenis ini.

Environmental merupakan bagian dari CSR sehingga *environmental disclosure* tercermin dari laporan CSR pada *annual report*, yang mengungkapkan tanggung jawab lingkungan dari perusahaan (Sari dan Yuniarta (2018)). Salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah rendahnya minat perusahaan terhadap konservasi lingkungan Juhairiyah, Afifudin, dan Junaidi (2018). PT. Kiat Pulm Paper (PT IKPP) Serang Banten yang tidak memiliki sistem pengolahan limbah yang baik dengan membuang limbah yang dihasilkan ke sungai ciujung yang mengakibatkan pencemaran dan berdampak pada menurunnya kualitas air sungai sedangkan kehidupan masyarakat bergantung pada sungai tersebut (Zullaekha dan Susanto (2021)).

Pemangku kepentingan khususnya investor, menghargai kebijakan CSR, termasuk pengungkapan lingkungan hidup, sebagai alat untuk menganalisis prospek keberlanjutan ekonomi dan profitabilitas. Banyak penelitian mengenai

praktik CG pada CSR yang telah dilakukan namun belum menemukan hasil yang konsisten (Cahyati¹, Meutia¹, & Yazid¹ 2023). Selain faktor pemangku kepentingan, penciptaan nilai bagi perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan juga muncul sebagai faktor yang ada dalam interkoneksi pengungkapan CSR dan tata kelola perusahaan (Hadijah & Utomo 2023). Dalam penelitian ini melalui indeks terbaru yang diluncurkan GRI yaitu GRI Standars akan terlihat sudah sejauh mana perlakuan pada industri manufaktur, pertanian, serta pertambangan dalam mengungkapkan informasi lingkungan, karena dalam kenyataannya masih terdapat perusahaan yang belum peduli terhadap lingkungan (Widyastuti, Prihatni, & Armeliza 2022).

Perhatian perusahaan pada masalah lingkungan masih minim. Hal ini terbukti banyak perusahaan yang melakukan perusakan lingkungan tanpa diimbangi dengan perbaikan lingkungan. Seperti halnya PT. Lapindo Brantas akibat kebocoran pipa yang menyebabkan rumah warga sekitarnya terendam lumpur hingga sekarang, PT Freeport Indonesia, penghasil emas terbesar di dunia tetapi menyebabkan tanah penggalian emas disana menjadi tandus dan tidak dapat digunakan kembali. Tahun 2018, PT. Rayon utama di protes oleh warga Sukoharjo akibat menghasilkan gas polusi berbahaya (Suprpti, Fajari, dan Anwar (2019). *Environmental* di Indonesia masih sedikit, sebagai negara yang berkembang dengan cukup banyak perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sekitar 9 sektor industri. Dengan adanya pedoman baru dari GRI (*Global Reporting intuitive*) yaitu GRI standard menjadi ukuran baru dalam pengungkapan lingkungan.

Corporate governance yang diterapkan dalam perusahaan memiliki hubungan yang erat dengan *environmental disclosure*. *Corporate governance* yang baik dapat digunakan sebagai alat untuk mengawasi kinerja perusahaan baik *stakeholder* maupun investor. *Corporate governance* juga memiliki pengaruh dalam proses *environmental disclosure* dimana perusahaan juga berharap pemberi pinjaman dan investor yakin bahwa perusahaan berada pada posisi kompetitif yang kuat dan perusahaan beroperasi secara efektif (Karjono (2021). *Environmental*

disclosure dikatakan berkualitas ketika informasi yang diungkapkan telah sesuai dengan yang diharapkan oleh *stakeholder* (Sumarji (2019). *Corporate governance* dalam penelitian ini diwakilkan dari kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit.

Kepemilikan institusional adalah porsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau badan (Dewi (2019). Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengendalian yang dipengaruhi oleh pihak eksternal (Andriani & Sudana 2023). Ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat tergantung pada besarnya investasi yang dilakukan Sari, Agustin, dan Mulyani (2019). Kepemilikan saham yang diwujudkan dalam bentuk pengendalian perusahaan perlu untuk mengungkapkan tanggung jawab lingkungan dalam bentuk pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*). Perusahaan diharuskan memperhatikan kepemilikan institusional karena merupakan kepemilikan saham perusahaan dari sebuah institusi. Dalam penelitian Della Amelia dan Trisnaningsih (2021) kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*. Dengan adanya kepemilikan mayoritas ini dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian (Iqbal 2022) serta Dewi dan Sanica (2017) menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen. Semakin kompeten dewan komisaris maka akan semakin mengurangi adanya kecurangan dalam laporan keuangan dan pengungkapan lingkungan dalam perusahaan (Mutmainah & Indrasari 2017b). Dewan komisaris termasuk dewan komisaris independen didalamnya memiliki peran untuk memberikan pengawasan dan nasihat kepada pihak manajer terkait dengan kegiatan operasional agar sesuai

dengan tujuan perusahaan (Dewi (2019)). Dalam Wardani dan Haryani (2019) menyimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan. Komisaris independen berkewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada dewan komisaris dalam mengambil keputusan untuk mengungkapkan laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian (Iqbal 2022) dan (Juhairiyah, Afifudin, & Junaidi 2018) menyatakan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Komite audit merupakan salah satu unsur kelembagaan dalam konsep *Good Corporate Governance* yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam level penerapannya Sari, Agustin, dan Mulyani (2019) Tipe industri merupakan faktor potensial yang mempengaruhi praktek pengungkapan sosial dan lingkungan. Komite audit dapat mendorong pihak manajemen dalam melakukan pengungkapan *environmental disclosure* secara transparan dan independen (Zullaekha 2020). Dalam pengungkapan sosial dan lingkungan antara perusahaan satu dengan yang lain memiliki pengungkapan yang berbeda sesuai dengan tipe industri perusahaan Sari dan Yuniarta (2018). Dalam penelitian Dewi (2019) komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Adanya pengaruh komite audit menunjukkan bahwa komite audit memiliki peran dalam mengawasi dan mendorong manajemen untuk mengungkapkan informasi yang luas. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Iqbal (2022) dan Kurniawan (2019) menyatakan komite audit tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Firm Size* dan *Leverage* sebagai variabel kontrol karena sudah terbukti bahwa *Firm Size* dan *Leverage* berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Hasil penelitian (Purnama 2018) dan (Adriana & Dewi 2019) menyatakan *firm size* mempengaruhi signifikan positif terhadap *environmental disclosure*. Berdasarkan teori agensi perusahaan yang tumbuh mempunyai anggaran agensi cukup besar dan disusul dengan menyatakan informasi lebih banyak pula. Dapat dikatakan bahwa perusahaan kecil maupun

perusahaan besar wajib mengungkapkan tanggung jawab terhadap lingkungan, karena kegiatan yang dilakukan perusahaan mempunyai dampak terhadap lingkungan sekitar perusahaan Adriana dan Dewi (2019). Hasil penelitian (Defitri 2018), Dewi (2019) dan Kartiko dan Halim (2022) menyatakan *leverage* mempengaruhi signifikan positif terhadap *environmental disclosure*. Berdasarkan teori agensi, manajemen perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya, hal ini dilakukan agar tidak menjadi sorotan dari para *debtholder* (Marem & Sugiyanto 2015).

Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi *leverage* menyebabkan timbulnya keraguan akan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya di masa depan sebagian besar dana yang diperoleh oleh perusahaan akan digunkan untuk membiayai hutang dan dana untuk beroperasi akan semakin berkurang. Sehingga kemungkinan besar perusahaan akan rendah dalam melakukan *environmental disclosure*.

Corporate governance di dalam penelitian ini disesuaikan dengan proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, dan rapat dewan komisaris Kurniawan (2019). Penelitian ini merupakan refleksi dari penelitian Kurniawan (2019). Dengan meneruskan saran yaitu mengganti dan menambahkan variabel rapat dewan komisaris dan kepemilikan institusional serta menjadikan *firm size* dan *leverage* sebagai variabel kontrol. Sebagai variabel yang dikendalikan sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak teliti. Tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang permasalahan dan penelitian terdahulu, penulis bertujuan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Environmental Disclosure*”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan penelitian yang dapat diambil adalah:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *environmental disclosure*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap *environmental disclosure*.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap *environmental disclosure*.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh:

1. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui pengaruh proporsi kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap *environmental disclosure*.
2. Bagi penelitian yang akan datang, penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan dalam penelitian yang berhubungan dengan proporsi

kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap *environmental disclosure*.

3. Memberikan kontribusi terhadap tumbuh kembang ilmu pendidikan walaupun hanya sebuah irisan kecil dari sebuah teori yang besar.

1.4 Ruang Lingkup atau Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka dibuat batasan atau ruang lingkup masalah sebagai berikut:

- a) Populasi penelitian dibatasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tahun penelitian dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.
- b) Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebatas pada *corporate governance*.

1.5 Sistematika Penulisan

Lima bab yang menyusun sistematika penulisan skripsi ini berfungsi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang skripsi yang dibuat. Sistematika termasuk yang berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama akan menguraikan latar belakang masalah mengenai permasalahan penelitian terkait dengan *Enviromental Disclosure*, selanjutnya membahas rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian baik secara praktis maupun teoritis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pengembangan hipotesis yang berasal dari penelitian sebelumnya, literatur dalam kuliah yang ada, serta kerangka pemikiran, semuanya akan dibahas dalam bab kedua ini, yang juga akan menyajikan landasan teori terkait dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Jenis penelitian, variabel penelitian, informasi populasi dan sampel, serta teknik analisis data dibahas dalam bab ketiga ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian akan dibahas secara rinci pada bab keempat ini, beserta temuan dari masing-masing hipotesis penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Temuan dan hasil penelitian dimuat dalam bab kelima ini, beserta rekomendasi untuk studi penelitian tambahan yang berguna dan dapat diterima oleh perusahaan.